



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RESSHUFFLE KABINET INDONESIA MAJU 15 JUNI 2022

Debora Sanur Lindawaty
Peneliti Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Rabu 15 Juni 2022 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri (wamen) pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Keppres Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Adapun dua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan para wamen yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan bahwa *reshuffle* kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian *reshuffle* kabinet ini telah melalui pertimbangan matang dan diskusi yang panjang. Diharapkan *reshuffle* ini dapat memperkuat dan memberikan penyegaran kabinet dalam menghadapi tantangan bangsa dan ancaman global, seperti antara lain persoalan pangan dan inflasi. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa penunjukan kedua menteri tersebut didasari sejumlah aspek, di antaranya adalah rekam jejak, pengalaman, hingga *skill manajerial* dalam melihat dan menyelesaikan persoalan baik secara makro maupun mikro yang mendetail.

Menurut Presiden, salah satu tantangan yang krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat. Presiden menilai bahwa Zulkifli Hasan telah memiliki rekam jejak pengalaman yang panjang dan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara itu, terkait penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden menilai bahwa Hadi Tjahjanto memiliki penguasaan terhadap teritori Indonesia serta dianggap mampu bekerja sangat detail di lapangan. Diharapkan Hadi Tjahjanto mampu menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, maupun urusan sertifikat.

Berikut profil Wamen yang dilantik pada 15 Juni 2022. Pertama, Raja Juli Antoni sebagai Wamen (ATR/BPN) merupakan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli menggantikan Wamen ATR/BPN sebelumnya Surya Tjandra, yang juga merupakan kader PSI. Raja Juli pernah menjabat menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan menjadi Direktur di *Eksekutif Maarif Institute* serta *Eksekutif The Indonesian Institute* (TII). Kedua, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wamen

Ketenagakerjaan (Wamenaker) merupakan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2019-2024. Afriansyah pernah menjadi direktur di beberapa perusahaan dan pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Agung Darma *Fiskal Plus Education*. Ketiga, John Wempi Watipo sebagai Wamen Dalam Negeri (Wamendagri). Sebelumnya Wempi Watipo juga pernah menjabat sebagai Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2019. Ia merupakan mantan Bupati Jayawijaya dua periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018 dan pernah mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait manajemen keuangan yang diterapkan di Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Atensi DPR

DPR RI perlu menekankan agar *Reshuffle* Kabinet benar-benar mampu mengakselerasi program percepatan pembangunan secara berkualitas. Langkah ini penting agar dapat mengatasi kompleksitas permasalahan dalam negeri dan ancaman krisis global, serta tidak sekedar mengakomodasi dukungan politik.

Dengan adanya *Reshuffle* Kabinet ini, maka Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkait dengan Komisi II DPR RI ialah Kementerian (ATR/BPN), Kemendagri, dan Lembaga Sekretariat Kabinet. Dalam fungsi legislasi diharapkan dapat kembali melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanahan. Hal ini agar berbagai masalah pertanahan di masyarakat dapat segera teratasi dan ditemukan solusinya. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, melalui kemitraannya tersebut Komisi II DPR RI perlu terus mendorong dan mengawasi kinerja pemerintah terutama dalam upaya memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber

cnnindonesia.com, 15 Juni 2022;
kompas.com, 15 Juni 2022;
presidenri.go.id , 15 Juni 2022;
setkab.go.id , 15 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.